BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional. Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Menyadari akan kebutuhan pelaksanaan di pemerintahan yang mengarah pada upaya mensejahterakan masyarakat maka, oleh pemerintah kemudian direvisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan Anggaran Daerah, khususnya masalah penganggaran.

Pembenahan menejemen keuangan negara mulai dilakukan Pemerintah Indonesia pada tahun 2003 yang ditandai dengan dikeluarkannya paket undang-

undang di bidang Keuangan Negara, yaitu Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara. Paket Undang-undang tersebut membawa perubahan mendasar dalam pengangguran, perbendaharaan dan pelaporan keuangan.

Paradigma (pandangan) baru pada masyarakat modern telah membentuk suatu perubahan di berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang keuangan yang mengedepankan keterbukaan (transfaransi), peningkatan efisiensi dan tanggung jawab yang lebih jelas. Paradigma tersebut merupakan akibat perkembangan proses demokrasi dan profesionalisasi di dunia, paradigm ini memasuki berbagai aspek kehidupan manusia. Proses krisis dan multidimensial (ekonomi, moneter, hokum, politik) di Indonesia mendorong paradigm tersebut, paradigm tersebut di Indonesia sering disebut *Good Govermance*. *Good Govermance* dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengendalian yang dapat diandalkan, pemerintah yang bertanggungjawab pada publiknya. Prinsip-prinsip dari Good Govermance antara lain adalah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. (Taufiequrachman Ruki, Buletin Komisi Yudisial, Vol. 2 No. 3, Hal 17).

Perubahan penting dalam bidang penganggaran meliputi pengintegritasian sistem akuntabilitas dalam sistem penganggaran, penyempurnaan verifikasi anggaran, penyatuan anggaran dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter untuk periode satu tahun dan implementasi dari rencana strategi yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam rangka waktu satu tahun, yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif orang lain. Penyusunan anggaran sering diartikan sebagai perencanaan laba *(proft planing).*

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah.

Secara teori, prinsip anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diinginkan yang mengacu pada hasil kinerja burupa (*output* dan *outcome*) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Performance based budgeting dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan *output* dan *outcome* yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertangungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat dampak

dari peningkatan pelayanan kepada publik. Untuk mencapai semua tujuan tersebut, kementerian negara/lembaga diberikan keleluasaan yang lebih besar untuk mengelola program dan kegiatan didukung dengan adanya tingkat kepastian yang lebih tinggi atas pembiayaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. (Subbag Ren : 2011)

Penerapan sistem penganggaran di Balai Pelatihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang menggunakan pendekatan *performance budget*, dilaksanakan secara bertahap (gradual) dan hati-hati. Hal ini disebabkan penyusunan penerapan anggaran berdasarkan line item yang sudah menjadi pola yang sangat mengakar di kalangan birokrasi Balai Pelatihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Balai Pelatihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bergerak dalam hal yang berkaitan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan sebagai dinas kepemerintahan.

Kenyataannya dalam melaksanakan penyusunan anggaran Balai Pelatihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tidak selalu berjalan dengan baik, kadangkala dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja setiap unit kerja yang ada dalam Balai Pelatihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya dilibatkan seratus persen mulai dari proses perencanaan sampai dengan anggaran berbasis kinerja tersebut disahkan. Unit-unit kerja tersebut kadang hanya dilibatkan dalam proses perramalan bahkan hanya ikut

serta dalam proses penyusunan anggaran saja. Hal tersebut membuat anggaran berbasis kinerja yang dihasilkan sasarannya kadang tidak tepat menurut Ir. H. Yesa Sarwedi Seno, M.Pd sebagai Kepala Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan mengambil judul tentang "**Tinjauan Atas Penyusunan Anggaran Bebasis Kinerja Pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat identifikasikan bahwa dari fenomena permasalahan yang diteliti adalah :

1. Anggaran berbasis kinerja tidak selalu berjalan dengan baik, tetapi kadangkala penyusunan anggaran berbasis kinerja setiap unit yang ada belum sepenuhnya dilibatkan seratus persen mulai dari proses perencanaan sampai dengan anggaran berbasis kinerja tersebut disahkan.
2. Unit-unit kerja tersebut kadang hanya dilibatkan dalam proses peramalan bahkan hanya ikut serta dalam proses penyusunan anggaran saja. Hal tersebut membuat anggaran berbasis kinerja yang dihasilkan sasarannya kadang tidak tepat.

1.2.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang penelitian dan identifikasi masalah maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana hambatan-hambatan dan solusi dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja di Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna ditinjau dan dianalisis tentang Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak atau hal sebagai berikut:

1.4.1 KegunaanPraktis

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait:

1. Bagi Perusahaan

   Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi persusahaan kedepannya.

2. Bagi Pihak Terkait

   Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan atau lainnya yang mungkin digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

3. Pihak lainnya

   Penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat sebagai bahan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta menjadi

informasi yang memadai khususnya bagi pihak terkait lainnya yang membutuhkan serta dapat menarik pengalaman secara tidak langsung**.**

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

   Dapat memberikan suatu karya penelitian di bidang ilmu ekonomi khususnya bidang akuntansi yaitu penelitian yang terkait dengan anggaran berbasis kinerja.

2. Bagi Peneliti

   Penelitian ini sangat berguna bagi penulis sebagai sarana untuk memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar Ahlimadya untuk jenjang Diploma III.

3. Bagi peneliti Lain

   Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan sebagai media informasi berkaitan dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini penulis melakukan penelitian pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Pahlawan No. 70 Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada bulan April sampai dengan Juli 2012. Selama melaksanakan penelitian pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas akhir.

Tabel 1.1

Waktu pelaksanaan Penelitian

No	Kegitan	Bulan				
		Maret 2012	April 2012	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012
I	**Tahap Persiapan :**					
	1. Membuat proposl tugas akhir.	■				
	2. Menentukan tempat penelitian	■	■	■		
II	**Tahap Pelaksanaan :**					
	1. Mengajukan outline dan	■	■			
	proposal tugas akhir	■	■			
	2. Meminta surat pengantar		■	■	■	
	ke Perusahaan		■	■	■	
	3. Penelitian di Perusahaan		■	■	■	■
	Bimbingan tugas akhir		■	■	■	■
III	**Tahap Pelaporan :**					
	1. Menyiapkan draft tugas akhir	■	■	■	■	■
	2. Sidang tugas akhir					■
	3. Revisi tugas akhir		■	■	■	■
	4. Penyerahan tugas akhir					■